

BAB II

RELEVANSI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

2.1 Makna Pembangunan

Pengertian pembangunan versi lama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada zaman ini, negara berlomba-lomba dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika negara tersebut dalam posisi keadaan ekonomi yang tinggi, maka negara tersebut masuk dalam kategori golongan negara maju. Begitu pula sebaliknya, apabila negara tersebut berada di tingkat perekonomian yang rendah, maka negara tersebut termasuk negara berkembang.

Berbeda dengan versi lama, pembangunan versi baru menyatakan pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan dapat dilakukan dalam suatu negara dengan syarat telah terbukanya politik pada negara tersebut, dengan kata lain pembangunan tidak mungkin terjadi tanpa adanya demokrasi. Meskipun demikian, dokumen kebijakan *a world of difference* mencatat bahwa dalam negara dengan rezim otoriter pun dapat terjadi dikarenakan mereka (investor) ingin menguasai seluruh pengambilan keputusan secara cepat dari pusat. Walaupun demikian, perjolahan himbauan akan hak asasi manusia

dan demokratisasi akan menjadi semakin nyaring dan kurangnya kebebasan politik pasti akan membuktikan semakin banyaknya kekurangannya dalam proses pembangunan yang semakin rumit dan memerlukan otonomi tersendiri yang lebih besar. Cepat atau lambat kebebasan politik menjadi prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berpengaruh dalam pembangunan ekonomi itu sendiri tetapi juga berpengaruh pada unsur lain. Terlepas dari itu, nilai kebebasan politik itu sendiri bukan yang terpenting dalam konteks pembangunan manusia. (Pronk, 1994, p. 27)

2.2 Human Development Index (HDI)

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia, sejak tahun 1990 *United Nation Development Program* (UNDP) telah mengembangkan suatu indeks yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau biasa juga disebut dengan istilah *Human Development Indeks* (HDI). Indeks tersebut telah dijadikan rujukan oleh negara-negara di dunia, khususnya yang tergabung dalam PBB, termasuk Indonesia. Di setiap pertemuan atau diskusi tentang pembangunan nasional, baik yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah ataupun LSM kita sering mendengar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) disebut sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tujuan disusunnya Indeks ini adalah sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Bagi Indonesia, HDI merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran

kinerja Pemerintah, HDI juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Secara umum, HDI dibentuk oleh 3 dimensi dasar sebagai berikut:

1. Umur panjang dan hidup sehat.
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak.

Namun HDI yang dibuat oleh *United Nation Development Program* (UNDP), indikatornya dirasa terlalu luas dan tidak sepenuhnya cocok dan cukup untuk mengukur pertumbuhan manusia dengan perspektif islami dikarenakan teori dan konsep yang digunakan dalam HDI tidak berdasar kepada syariah (*Maqasid al-Shari'ah*). Mengukur pertumbuhan manusia yang berada di Negara-negara muslim, harus dengan pendekatan *Islamic Human Development Index* (I-HDI).

2.3 Islamic Human Development Index (I-HDI)

Terdapat tujuan yang berbeda antara HDI dengan I-HDI. Tujuan dari I-HDI adalah untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif dan holistik baik di dunia dan akhirat. Sedangkan HDI, dari indikatornya hanya untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim, dan ini dirasa tidak cukup. Hal ini seperti yang dikatakan :

“ Islamic perspective on economic development is unique and original which is totally different from the conventional views, specifically

in its fundamental base. The objective of economic development in Islamic perspective is to achieve a comprehensive and holistic welfare both in the world and the hereafter (akheerah). It is called fal . Based on this objective and other characteristics of Islamic economic development, the conventional indicator of economic development is insufficient to measure the level of economic development in Muslim countries.”

I-HDI adalah indeks gabungan dari beberapa indikator yang berasal dari lima kebutuhan dasar dalam rangka mewujudkan syariah. Mengingat kompleksitas pembangunan dalam Islam, sulit untuk menentukan variabel non-kuantitatif seperti kebebasan, religiusitas dan nilai-nilai keluarga dalam ukuran yang lebih memadai dari pembangunan manusia. Namun demikian, I-HDI menggabungkan kedua variabel kuantitatif dan variabel mengungkapkan persepsi. Ini mencampur berbagai jenis indikator: input dan output, stok dan aliran, tunggal dan komposit.

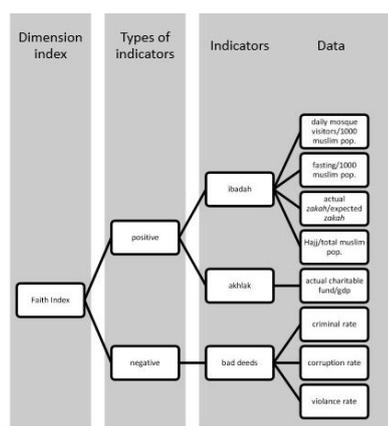
I-HDI menggunakan perspektif islam dalam upaya pembangunan ekonomi, dikarenakan pembangunan manusia dan kesejahteraan manusia memiliki tempat penting dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Pembangunan atau pembangunan ekonomi maka harus konsisten dengan tujuan; Memperkaya iman (*ad din*), diri manusia (*an nafs*), kecerdasan (*al aql*), keturunan (*an nasl*) dan kekayaan (*al mal*) harus menjadi fokus utama dari semua usaha dan pembangunan manusia. Lima dimensi kebutuhan dasar pembangunan ini yang akan menjadi syarat untuk mencapai kesejahteraan dan bahagia hidup di dunia dan akhirat. Dimensi ini

mengukur baik kinerja kesejahteraan materi serta kesejahteraan non-materi. Kesejahteraan dalam kehidupan duniawi bersifat sementara sementara kesejahteraan di akhirat adalah kekal dan permanen (Qur'an, 87: 16-17, 09:38), sehingga falis konsep yang komprehensif dan holistik kesejahteraan manusia (Qur'an, 2: 201, 28:77). Maka dari itu, Islam menyoroti pentingnya kepemilikan properti serta distribusinya di antara masyarakat.

Untuk mencapai keseimbangan di dunia maupun di akhirat, dimensi-dimensi yang harus dibangun adalah dimensi keimanan, kelangsungan hidup, pengetahuan, keluarga ideal, properti, kebebasan, dan keadilan. Dimensi tersebut diukur dengan indeks-indeks yang berupa indeks keimanan, indeks kelangsungan hidup, indeks pengetahuan, indeks keluarga ideal, indeks properti, indeks kebebasan, dan indeks keadilan.

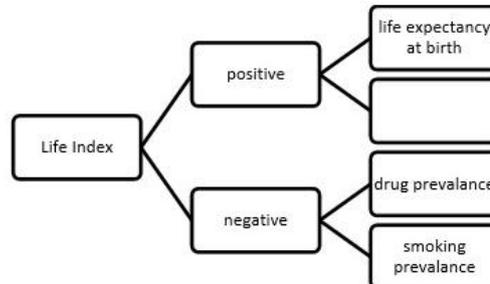
Dimensi keimanan, diukur dengan indikator berikut :

Gambar 2.1. Dimensi Keimanan



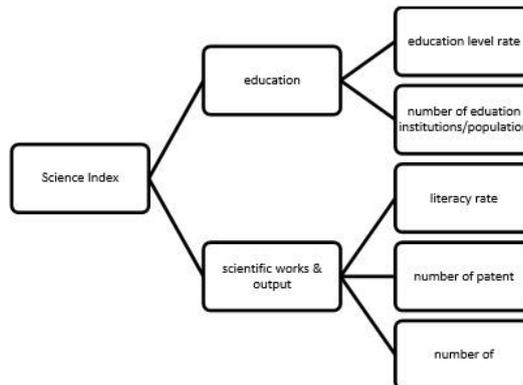
Dimensi kelangsungan hidup, diukur dengan indikator berikut :

Gambar 2.2. Dimensi Kelangsungan Hidup



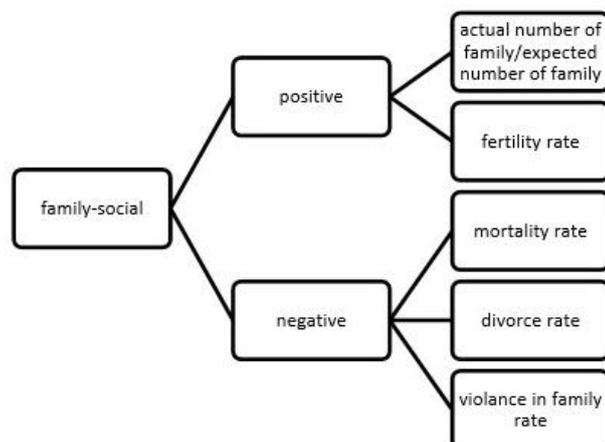
Dimensi pengetahuan, diukur dengan indikator berikut :

Gambar 2.3. Dimensi Pengetahuan



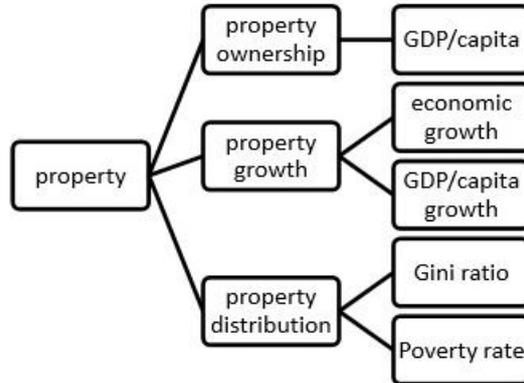
Dimensi keluarga ideal, diukur dengan indikator berikut :

Gambar 2.4. Dimensi Keluarga Ideal



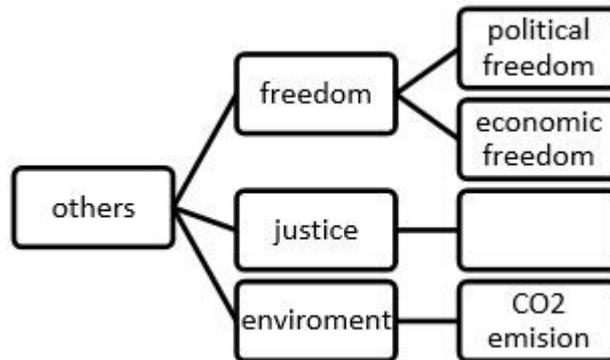
Dimensi properti, diukur dengan indikator berikut :

Gambar 2.5. Dimensi Properti



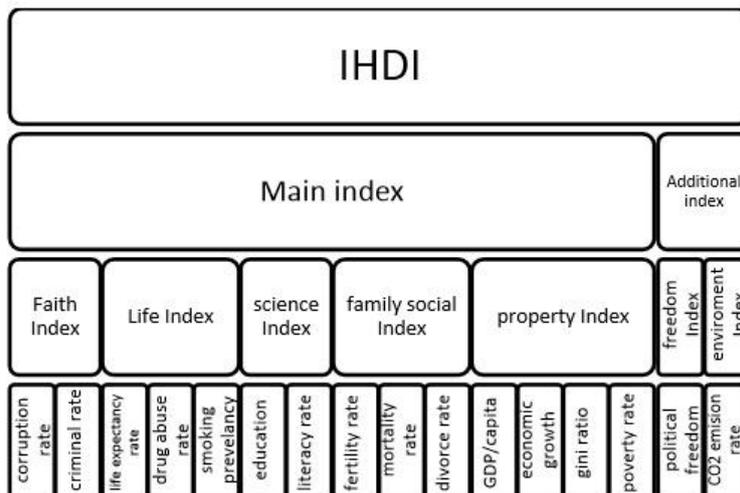
Dimensi lainnya, diukur dengan indikator berikut :

Gambar 2.6. Dimensi lainnya



Secara umum, *Islamic Human Development Index* digambarkan dengan bagan berikut :

Gambar 2.7. *Islamic Human Development Index*



Untuk mendapatkan kesejahteraan yang menyeluruh, kesejahteraan yang dibagi menjadi Indeks Kesejahteraan Materi dan Index Kesejahteraan Non-materi, meliputi beberapa aspek diantaranya kepemilikan property, keadilan dalam berdistribusi, nilai-nilai dan lingkungan yang islami. Hal diatas diukur dengan GDP Index, Gini Index, Indeks Kemiskinan, Indeks harapan hidup, Indeks Pengetahuan, Indeks keluarga ideal, dan indeks religiusitas.

Seperti pada indeks umumnya, salah satu tujuan dari pembangunan I-HDI juga untuk dapat mengklasifikasikan atau peringkat negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi. Pertama-tama dengan cara menormalkan data untuk masing-masing dimensi dan kemudian, kedua, mengambil aritmatika rata-rata mereka dari jumlah semua dimensi.

Untuk menghitung indeks dimensi-dimensi diatas, nilai minimum dan maksimum yang dipilih untuk masing-masing indikator yang mendasari, dinyatakan sebagai nilai antara 0 dan 1.

Dimana nilai aktual menunjukkan nilai sebenarnya dari dimensi suatu negara sementara max. nilai dan nilai min. adalah maksimum dan nilai minimum dari dimensi yang sama dalam sampel negara. Oleh karena itu, metodologi untuk menghitung I-HDI adalah dengan cara; pertama, menghitung setiap indeks dimensi, dan kemudian kedua menghitung I-HDI. Singkatnya, I-HDI adalah rata-rata tertimbang dari indeks kesejahteraan materi dan indeks kesejahteraan non-materi.

Indeks utama dihitung untuk mengukur tingkat kesejahteraan materi dalam populasi yang ditunjukkan dengan kepemilikan properti atau pendapatan serta distribusinya.

GI adalah indeks komposit dari PDB. Dalam menghitung PDB Index (GI), digunakan adjusted GDP perkapita daripada pertumbuhan PDB atau GDP persen dikarenakan GDP perkapita menunjukkan potensi distribusi PDB antara penduduk, sehingga bisa mencerminkan kepemilikan properti/pendapatan di antara penduduk. Sedangkan DEI adalah indeks kemampuan distribusi. GDP tinggi tidak akan memberikan kontribusi yang baik terhadap kesejahteraan materi tanpa adanya distribusi yang baik, namun PDB Index sebaliknya.

Koefisien Gini dipilih karena popularitas dan karena secara teratur ditemukan dalam publikasi Bank Dunia dan PBB, namun, hanya mengukur ketimpangan distribusi pendapatan tetapi tidak menunjukkan tingkat kemiskinan, sehingga kita harus menambahkan Indeks Kemiskinan untuk memiliki *Distribusi ini Equity Index* (DEI). Perhitungan Gini Index mengambil dua tahap, pertama menormalkan koefisien Gini dan kedua menggunakan ini dinormalisasi koefisien Gini untuk menghitung Gini Index. Indeks Kemiskinan yang didasarkan pada tingkat kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode yang sama seperti Gini Index dan akhirnya Distribusi Equity Index adalah rata-rata aritmatika dari Gini Index dan Indeks Kemiskinan.

Indeks kesejahteraan non material diukur dengan Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Sosial Keluarga, dan Religiusitas Index. jadi ini hanya rata-rata aritmatika dari empat indeks.

Untuk menghitung Harapan Hidup Index dan Indeks Pendidikan, dapat menerapkan perhitungan dari *Human Development Index (HDI)*. Indeks harapan hidup mengukur pencapaian relatif suatu negara dalam harapan hidup, sementara indeks pendidikan mengukur pencapaian relatif suatu negara baik dalam pengetahuan aksara dari orang dewasa dan dikombinasikan primer, sekunder dan tersier partisipasi kasar. Untuk indeks pendidikan, pertama indeks untuk pengetahuan aksara orang dewasa dan satu untuk gabungan partisipasi kasar dihitung. Kemudian dua indeks ini digabungkan untuk membuat indeks pendidikan.

Sulit untuk mengukur Indeks Keluarga ideal serta Indeks Religiusitas. Alasannya adalah tidak semua dari aspek sosial keluarga dan religiusitas dapat dihitung. Adapun bila bisa dihitung, sebagian besar ketersediaan data dipertanyakan. Idealnya, Indeks Keluarga-Sosial bisa menunjukkan kondisi dan kinerja masyarakat menyangkut keluarga dan sosial nilai-nilai dalam perspektif Islam. Karenanya, Keluarga-Indeks Sosial dihitung dari kesuburan Index disesuaikan dengan Indeks mortalitas.

Untuk Religiusitas Indeks, idealnya kita harus memiliki indikator yang mengukur visi, komitmen, dan implementasi ajaran Islam dalam perspektif holistik dalam masyarakat. Indikator ini harus mencakup praktik

dasar ajaran Islam, misalnya, jumlah atau persentase orang yang melaksanakan haji, melakukan shalat di masjid, membayar zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, melakukan puasa, dll yang kita sebut dengan *mahdah*. Selain itu, indeks religiusitas idealnya harus menunjukkan perilaku nyata dari masyarakat tentang nilai-nilai dan norma Islam, yang disebut *ghairah mahdah*.

2.4 Pembangunan di Indonesia

Pembangunan Indonesia sudah direncanakan sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada tanggal 12 April 1947, Presiden membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau yang sering dikenal sebagai *Brain Trust*. Panitia tersebut berhasil merumuskan rencana pembangunan sementara yang diberi judul “Dasar Pokok Daripada Plan Mengatoer Ekonomi Indonesia”, namun di tahun yang sama juga dibuat perencanaan baru untuk beberapa sektor ekonomi yang diberi nama “Plan Prodoeksi tiga Tahun RI” yang meliputi tahun 1948-1950 untuk bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan. Ketika masa Federal, disusun “Rentjana Kesedjahteraan Istimewa 1950-1951” khusus menangani bidang pangan. Kemudian disusul dengan “Rentjana Urgensi untuk Perkembangan Industri” tahun 1951-1952. Perencanaan-perencanaan diatas bersifat spesifik pada bidang-bidang tertentu, sehingga dalam kenyataannya tidak dapat terealisasikan dengan baik. (Tarmidi, 1992)

Kemudian pada tahun 1952, ada usaha-usaha untuk dapat melakukan suatu perencanaan dengan cara yang lebih menyeluruh. Usaha

tersebut adalah dengan membentuk Biro Perantjang Negara. Dalam perencanaan ini, disusun suatu Rentjana Pembangoenan Lima Tahun 1956-1960 yang kemudian baru dilegalkan melalui undang-undang pada tahun 1958, namun pada tahun 1959 diganti dengan rencana baru yang dinamai Rentjana Pembangoenan Nasional Semesta Berentjana (RPNSB) 1961-1969 yang dilaksanakan selama 8 tahun. Pada rencana 8 tahun ini dibagi atas rencana tahapan 3 tahun dan 5 tahun. Pada tahun 1964, dibentuk Badan Perentjanaaan Pembangoenan Nasional (Bappenas) yang merupakan perpecahan dari Dewan Perantjang Nasional (Depernas). RPNSB ini lebih merupakan dokumen politik dari sebuah perencanaan pembangunan nasional dibandingkan perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Isi dari rencana tersebut lebih merupakan daftar kenginan dari banyak pihak dengan sasaran yang berlebihan sehingga tidak realistis dan sulit dicapai. Namun karena pada saat itu, keadaan Indonesia sedang mengalami krisis akibat perpolitikan Indonesia maka kemudian dibentuklah Rencana Ekonomi Perdjoangan Tiga Tahun yang sering disebut *Rentjana Banting Stir*. Namun rencana ini tetap mengalami kegagalan dan belum sempat terealisasikan.

Sejak Orde Baru, perencanaan-perencanaan pembangunan di Indonesia dimulai dengan perencanaan yang teknis ilmiah. Bappenas merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Rapelita I) yang dimulai 1 April 1969, dan rapelita ini diperbaharui setiap lima tahun sekali. Rapelita disusun berdasarkan Pedoman Pola Umum Jangka Panjang

menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Mulanya, Repelita ke I dan ke II masih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi meskipun aspek pemerataan juga dimasukkan, tetapi mulai Repelita ke-III dan Repelita ke-IV, tujuan pembangunan lebih dipertegas dengan dicanangkannya **Trilogi Pembangunan** :

- (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
- (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
- (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Di Indonesia, dikenal tiga tahapan perencanaan, yakni:

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Rapelita)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

GBHN merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh badan tertinggi negara yakni MPR yang didalamnya terdapat Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun. Rapelita disusun oleh Pemerintah/Bappenas berdasarkan patokan-patokan yang telah digariskan dalam GBHN. Setiap tahunnya, Rapelita dilaksanakan oleh pemerintah melalui APBN.

Sebagaimana Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing Periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2015-2019 atau RPJM ke-3, adalah: “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Iptek”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, maka RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 pada 8 Januari 2015.

2.5 Kondisi Indonesia menurut I-HDI

Terdapat perbedaan peringkat antara HDI dengan I-HDI. Di satu sisi, sejumlah negara mendapatkan peringkat atas dalam I-HDI, dibandingkan HDI. Namun, di sisi lain terdapat beberapa negara yang mengalami kemunduran jika menggunakan rumusan I-HDI.

Dalam I-HDI, mayoritas peringkat-peringkat tertinggi diduduki oleh negara-negara timur tengah. Sedangkan peringkat terendah kebanyakan pada negara-negara Afrika.

Data menunjukkan Indonesia memiliki nilai ranking sebesar 0.557143 dari jangkauan maksimal sebesar 1. Hal ini menunjukkan kondisi Indonesia yang ada pada garis standar. Dibandingkan dengan Qatar, yang memiliki nilai sebesar 0,901355.